**BERBAGAI INOVASI TERKAIT DISTRIBUSI SDM KESEHATAN**

* **PENGEMBANGAN MODEL PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASE*)**

Model penempatan tenaga kesehatan berbasis tim (Team Base) merupakan salah satu rekomendasi model penempatan distribusi tenaga kesehatan dalam policy paper hasil kajian tahun 2012 oleh Pusrengun SDM Kesehatan. Pada tahun 2014 sedang dilakukan uji coba penempatan tenaga kesehatan secara berkelompok untuk menjalankan pelayanan kesehatan di daerah tertentu, terutama daerah dengan tanggung jawab wilayah kerja yang luas. Diharapkan dengan bekerja secara berkelompok, tim tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok terpencil. Tim akan didukung dengan biaya transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah (kepulauan/pegunungan/lembah). Penempatan tenaga kesehatan berbasis tim dimaksudkan agar dapat meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang ditempatkan di lokasi penugasan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, dan mengatasi masalah kesehatan.

Uji Coba penempatan tenaga kesehatan berbasis tim dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara, Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat, Kab. Maluku Tenggara Barat Prov. Maluku Utara, dan Kab. Boven Digul Prov. Papua.

* **PENYUSUNAN KAJIAN TERKAIT PELAKSANAAN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN**
* **Kajian Program Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

Program PTT dilatarbelakangi dengan Undang-undang no. 8 tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana yang mewajibkan setiap sarjana tanpa kecuali untuk mengabdi sekurang-kurangnya 3 tahun pada Negara. Penempatan tenaga kesehatan melalui sistem Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditetapkan melalui Keputusan Presiden no. 37 tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Dalam kurun waktu tersebut, belum pernah ada kajian mengenai efektifitas program PTT dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Menyongsong berakhirnya RPJMN II 2010-2014, Pusrengun SDM Kesehatan bekerja sama dengan Badan Litbang Kesehatan melaksanakan Kajian Penempatan Tenaga Kesehatan PTT. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penempatan tenaga kesehatan yang sesuai untuk RPJMN III 2015-2019.

* **Kajian Komponen Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di DTPK**

Pemberian insentif selama ini dirasakan belum mampu menyelesaikan masalah maldistribusi. Kebijakan insentif saat ini hanya untuk dokter spesialis, dokter, dokter gigi dan bidan yang bertugas di daerah sangat terpencil dan berstatus PTT. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1307/MENKES/SK/IX/2010 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter PTT dan Bidan PTT telah menetapkan besaran insentif bagi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, dan bidan PTT yang bekerja di daerah sangat terpencil di seluruh Indonesia. Besaran insentif (sebelum dipotong pajak) sama untuk seluruh daerah yang dikategorikan sangat terpencil yaitu Dokter spesialis Rp. 8.300.000,00/bulan; Dokter/Dokter gigi Rp. 5.800.000,00/bulan; Bidan Rp. 2.700.000,00/bulan. Kebijakan tersebut antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah keengganan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah sangat terpencil.

Dengan dilakukan Kajian Komponen Insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK diharapkan diperoleh jenis insentif yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan di lokasi penugasan.

* **Kajian Faktor Determinan Retensi Tenaga Kesehatan di Fasyankes di DTPK di Indonesia.**

Retensi tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program pemerataan tenaga kesehatan. WHO mendefenisikan retensi tenaga kesehatan sebagai mempekerjakan tenaga kesehatan yang terampil dan produktif secara terus-menerus. Data terkait retensi tenaga kesehatan di fasyankes masih sangat terbatas. Berapa lama tenaga kesehatan tersebut bekerja serta jenis tenaga kesehatan apa saja yang harus didayagunakan di daerah tertentu. Informasi ini sangat penting mengingat ketersediaan tenaga kesehatan merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Kajian Faktor Determinan Retensi Tenaga Kesehatan di Fasyankes di DTPK di Indonesia bertujuan untuk mengetahui faktor determinan peningkatan retensi tenaga kesehatan di fasyankes di DTPK di Indonesia. Kegiatan ini merupakan kerja sama Badan PPSDM Kesehatan dengan AIPHSS.